BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

SEMESTER I TAHUN 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.01

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2025

Jl. Dr. SUMARNO No.1, Penggilingan

Telp. 021-48703788 Fax. 021-48703786

Jakarta Timur - DKI Jakarta 13940

e-mail : info@pn-jakartatimur.go.id

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dai APBN tertapi sudah diserah terimakan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
   a. Perusahaan Perseroan, dan
   b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset

lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkan pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara pada SAKTI, pindahan dari SIMAK-BMN.

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SAKTI selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SAKTI juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SAKTI diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

a. Ketaatan, yaitu SAKTI diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.

b. Konsistensi, yaitu SAKTI dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Kemampubandingan, yaitu SAKTI menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
d. Materialitas, yaitu SAKTI dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
e. Obyektif, yaitu SAKTI dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
f. Kelengkapan, yaitu SAKTI mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SAKTI merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SAKTI.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.

14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;

c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI modul Persediaan dan Aset Tetap UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi SAKTI modul GL/Pelaporan UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SAKTI dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SAKTI tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian

keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SAKTI, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementrian /Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Negeri Jakarta Timur semester I tahun 2025 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah sebesar **Rp. 104,101,180,612,-** dengan rincian sebagai berikut:

NAMA ASET	*NILAI RUPIAH*
Barang Konsumsi	**91,801,413**
Bahan untuk Pemeliharaan	**40,949,616**
Tanah	**56,095,378,000**
Peralatan dan Mesin	**5,934,015,110**
Gedung dan Bangunan	**56,921,555,555**
Aset Tetap Lainnya	**115,179,462**
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	**(5,449,821,681)**
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	**(9,889,226,863)**

Software	**26,400,000**
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	**57,657,900**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	**(57,657,900)**
Akumulasi Amortisasi Software	**(26,400,000)**
Jumlah	**104,101,180,612**

Berikut table dan grafik peningkatan nilai BMN TA 2024 dengan Semester I TA 2025.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

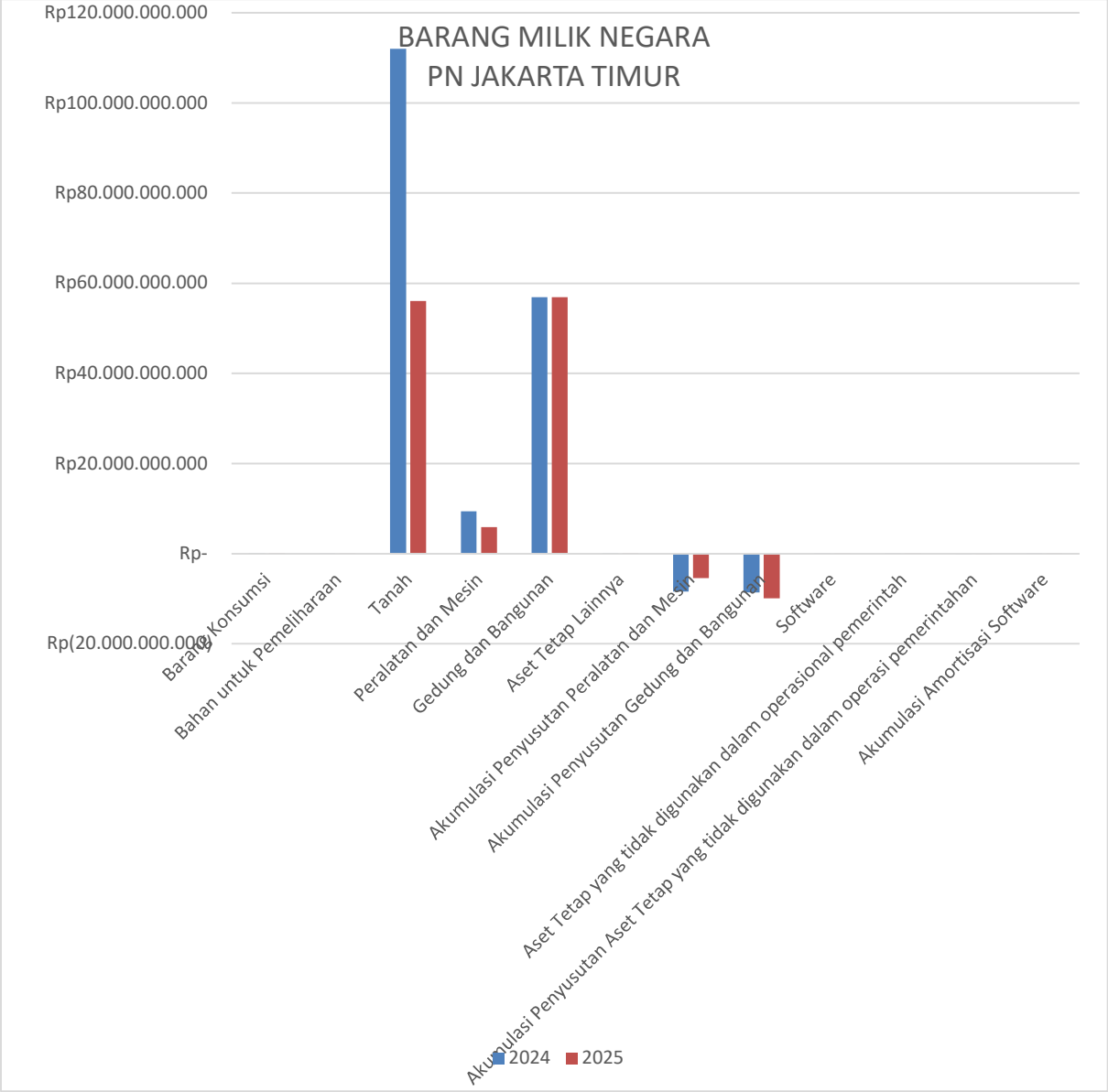
NAMA ASET	*TA 2024*	*TA 2025*
Barang Konsumsi	115,235,948	91,801,413
Bahan untuk Pemeliharaan	46,093,792	40,949,616
Tanah	112,020,234,000	56,095,378,000
Peralatan dan Mesin	9,379,059,572	5,934,015,110
Gedung dan Bangunan	56,927,255,555	56,921,555,555
Aset Tetap Renovasi	53,974,305	0
Aset Tetap Lainnya	115,179,462	115,179,462
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8,456,835,892)	(5,449,821,681)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8,627,614,231)	(9,889,226,863)
Software	26,400,000	26,400,000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	57,657,900	57,657,900
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(57,657,900)	(57,657,900)

Akumulasi Amortisasi Software	**(26.400.000)**	**(26,400,000)**
Total	**161,572,582,511**	**104,101,180,612**

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai;
b. Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2025 mengalami perubahan;
c. Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai;
d. Nilai Jalan, irigasi, dan jaringan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai;
e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai;

f. Nilai Software pada Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai;

g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai;

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2025 mengalami perubahan nilai.

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

PERSEDIAAN	TA 2024	TA 2025
Barang Konsumsi	**25,828,804**	**91,801,413**
Amunisi	**0**	**0**
Bahan Untuk Pemeliharaan	**28,458,029**	**40,949,616**
Suku Cadang	**0**	**0**
Pita Cukai, Materai dan Leges	**0**	
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	**0**	**0**
Bahan Baku	**0**	**0**
Barang dalam Proses	**0**	**0**
Persediaan untuk Tujuan Strategis	**0**	**0**
Persediaan Barang Hasil Sitaan	**0**	**0**
Total	**54,286,833**	**132,751,029**

4.2.3 KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Tidak terdapat Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2025.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB satker Pengadilan Negeri Jakarta Timur Semester I tahun 2025 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut table Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2025.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR SEMESTER I TAHUN 2025

NAMA ASET	*TA 2024*	*TA 2025*
Barang Konsumsi	115,235,948	91,801,413
Bahan untuk Pemeliharaan	46,093,792	40,949,616
Tanah	112,020,234,000	56,095,378,000
Peralatan dan Mesin	9,379,059,572	5,934,015,110
Gedung dan Bangunan	56,927,255,555	56,921,555,555
Aset Tetap Renovasi	53,974,305	0
Aset Tetap Lainnya	115,179,462	115,179,462
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8,456,835,892)	(5,449,821,681)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8,627,614,231)	(9,889,226,863)
Software	26,400,000	26,400,000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	57,657,900	57,657,900
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(57,657,900)	(57,657,900)

pemerintahan		
Akumulasi Amortisasi Software	**(26.400.000)**	**(26,400,000)**
Total	**164,272,259,948**	**161,572,582,511**

V. MONITORING & EVALUASI

5.1. MONITORING

Dalam Penatausahaan Barang Milik Negara ditemukan beberapa kendala antara lain :

1. Terdapat Penghapusan Barang Milik Negara dengan Mekanisme Penjualan terhadap 972 aset sebagaimana tertera pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 5079/SEK/SK.PL1.2.3/V/2025 tertanggal 21 Mei 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur (SK Terlampir), yang mengakibatkan kurangnya aset sebagai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
2. Terdapat Barang Milik Negara berupa Kendaraan Operasional dan Kendaraan Jabatan dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan Kondisi Rusak pada PN Jakarta Timur Nomor 5432/SEK.W10-U5/BA.PL.01/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025; dan
3. Terdapat Generating Stationary yang tidak berfungsi dikarenakan tidak memiliki jaringan.

5.2. EVALUASI

Atas beberapa kondisi pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, akan ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus;
2. Akan dilaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan

bermotor dengan Mekanisme Penjualan;

3. Akan dilakukan Penghapusan terhadap Generating Stationary tersebut.

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tahun 2025 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat. Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementrian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2025 bisa dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

Jakarta, 24 Juli 2025

Kuasa Pengguna Barang

Teguh Bernowo, SH., MH.

NIP. 198205232006041002